

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bersama, P., Effendi, S., Gunawan, B., Salim, E., Pembangunan, A., Pembangunan, M., Sentral, P., & Proyek-proyek, P. (n.d.). (*Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*) Prof. Bintoro Tjokroamidjojo. 1–21.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). perlindungan Konsumen, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Hermanu, B., Ilminingtyas, D., & Handayani, W. (2020). Perlindungan Konsumen Pangan. *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG Indonesia*, 180–196.
- Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). *Fungsi pengawasan upt. perlindungan konsumen medan dalam peredaran makanan kemasan di kota medan*.
- Indonesia, K. P. (2021). *Kementerian Perdagangan Indonesia. Manajemen Sumber Daya Manusia by Hadari Nawawi*. (n.d.). Retrieved March 10, 2022,
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. (2015). *Analisis Evaluasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa*.
- Mira Erlinawati, W. N. (2017). Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum*, 11(01), 27–40.
- Pardede, J. F., Prastya, I. Y., Winarti, N., & Publik, K. (2021). *IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BINTAN NO 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TABUNG GAS 3 KG BERSUBSIDI DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN*. 8(1), 40–48.
- Perlindungan, U., & Konsumen, P. (2017). *Issn : no. 0854-2031*. 15(0854), 45–51.
- Pesulima, T. L., Matuankotta, J. K., & Kuahaty, S. S. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon. *Sasi*, 27(2), 160.
- Riattang, S. T., Bone, K., Usman, S., & Ibrahim, M. M. (2020). *E 256 □. IV(2)*, 256–266.
- Tinggi, S., Administrasi, I., & Yusuf, M. (2017). *Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis*. 5(2), 1–10.
- Warjiyati, S. (2018). Implementasi {Good} {Governance} {Dalam} {Pelaksanaan} {Pemerintahan} {Indonesia}. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, 64, 1–10.

Jurnal dan Website :

- Devanti, P. A. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan*.
- Farida, I., & Sudarsih, N. (2021). *Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian Urusan Administrasi Dan Tata Usaha Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda ...* <https://osf.io/download/6090d02f6801ab032c2acd65/>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung, 2006, hal. 3 - PDF Free Download. (n.d.). Retrieved March 10, 2022
- Zuhro, R. S. (2016). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1), 1–21.
- Manajemen Sumber Daya Manusia by Hadari Nawawi*. (n.d.). Retrieved March 10, 2022, from <https://www.goodreads.com/book/show/6366392-manajemen-sumber-daya-manusia>
- Senjaya, A. J. (2019). Outline (Sistematika Penulisan) Karya Tulis Akademik (Skripsi, Tesis, Dan Disertasi). *Abdi Wiralodra : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 125–146. 1
- Nielwaty, E., Prihati, P., & Zuhdi, S. (2017). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang Dan Jasa Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 10(1), 1–5.

Perundang-undangan :

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 45

UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, UPT Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
- d. pelaksanaan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri;
- f. pemberiandukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

- 1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan anggaran;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga;
 - b. melaksanakan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
 - c. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- 3) Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - b. melaksanakan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
 - c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Surabaya, Malang, Bojonegoro, Jember dan Kediri;

- d. memberikan dukungan teknis pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelakuusaha;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Lampiran 2. Instrumen Wawancara 1

Untuk ditanyakan Kepada Pelaksana Pengawasan

(Staf UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya)

a) Sub Indikator : Komunikasi

1. Apakah Menurut Bapak/Ibu Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Tentang uraian tugas dan fungsi Seksi Pengawasan barang beredar, jasa, tertib niaga sudah terlaksana dengan maksimal?
2. Apakah menurut bapak/ibu Seksi pengawasan barang beredar mempunyai keunggulan dalam melakukan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2018?
3. Apakah menurut bapak/ibu pengawasan barang beredar dilapangan mempunyai kelemahan? Bagaimana cara bapak/ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut?

b) Sub Indikator Sumber Daya

1. Stakeholder siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga?
2. Apakah SDM di UPT Perlindungan Kota Surabaya ini sudah memadai?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana cara mempublikasikan edukasi mengenai Standart Produk kepada masyarakat? Apakah publikasi yang sudah dilakukan sudah optimal?
4. Dalam publikasi yang sudah optimal, adalah tolak ukur keberhasilan masyarakat dalam memahami standart produk yang sudah di tentukan?
5. Menurut bapak/ibu apakah sarana dan prasarana yang ada di UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya ini sudah memadai dan terelialisasikan dengan baik?
6. Apa saja manfaat yang didapat oleh masyarakat dengan adanya pengawasan barang beredar, jasa, tertib niaga??

c) Sub Indikator Disposisi

1. Apakah ada hambatan yang dialami para pegawai dan staff dalam melaksanakan pengawasan barang beredar?

2. Bagaimana cara pihak staff dan pegawai yang ada di UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam melaksanakan Pengawasan dilapangan?

d) Struktur Birokrasi

1. Bagaimana SOP dalam melaksanakan tugas pekerjaan masing-masing pegawai? Apakah sudah berjalan optimal sesuai SOP?

Lampiran 3. Instrumen Wawancara 2

Untuk ditanyakan kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat sebagai Konsumen

1. Apakah Anda mengetahui mengenai standart suatu produk?
2. Apakah pendapat Anda mengenai pengawasan barang beredar yang di lakukan petugas dilapangan?
3. Bagaimana menurut saudara mengenai pelayanan yang diberikan oleh petugas Pengawasan?
4. Dari manakah Anda mendapatkan informasi mengenai Standart suatu produk?
5. Apakah Anda menerima dengan baik informasi tentang konsumen cerdas?
6. Apakah Anda masih menemukan produk yang tidak sesuai dengan standart pemerintah?
7. Apa harapan Anda mengenai Pengawasan Barang beredar kedepanntya?

Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar, Jasa, Tertib Niaga





Lampiran 5. Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara dengan Informan

Wawancara dengan Kepala UPT.PK Surabaya.



Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan barang beredar, jasa, tertib niaga



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



Wawancara dengan pelaku Usaha.



Wawancara dengan Masyarakat (Konsumen)



Lampiran 6. Surat persetujuan Observasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Siwalankerto Utara II / 42-Surabaya, Fax. 8431717 Fax. 8432417 Kode Pos 60236, PO BOX 4110
e-mail ppid.disperindagjehm@gmail.com


TANDA TERIMA INFORMASI PUBLIK

No : 33 / PPID / INDAGJATIM / 2022


Nama Pemohon / Pengguna Informasi : Anggraeni Yohan Sonata Ery
Informasi yang diterima : Implementasi Pergub Prov. Jawa Timur No. 60 tahun 2018.
Format informasi yang diterima : Terekam
Cara mendapatkan informasi : Langsung

Surabaya, 09 Juni 2022

Pemohon Informasi


(Anggraeni Yohan Sonata Ery)

Pejabat PPID
Disperindag Jatim


(Arya Pramudhita)

Lampiran 7. Perintah Hasil Revisi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG)
SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : Adm. Pblk , Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi,
Magister Adm.
Publik, Doktor Ilmu Adm.
Gedung : F 101.Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

LEMBAR PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa:

NBI dan Nama : Anggraeni Yohan Sonata-1111800086
Program Studi : Administrasi Negara

Memerintahkan untuk mengadakan Revisi Skripsi sbb:

No	Keterangan Revisi
	Kesimpulan di sesuaikan dengan Pembahasan

Surabaya, 20/06/2022

Setuju telah direvisi,
Dosen Penguji,

Dosen Penguji,


(Dr. Bambang Kusbandrijo, MS)


(Dr. Bambang Kusbandrijo, MS)



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG)
SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : Adm. Pblk , Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi,
Magister Adm.
Publik, Doktor Ilmu Adm.
Gedung : F 101.Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

LEMBAR PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa:

NBI dan Nama : Anggraeni Yohan Sonata-1111800086
Program Studi : Administrasi Negara


Memerintahkan untuk mengadakan Revisi Skripsi sbb:


No	Keterangan Revisi
	Tanpa Revisi

Surabaya, 20/06/2022 11:09:14

Setuju telah direvisi,
Dosen Penguji,

Dosen Penguji,


(Prof. Dr. Arif Darmawan, SU)


(Prof. Dr. Arif Darmawan, SU)



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG)
SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : Adm. Pblk , Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi,
Magister Adm.
Publik, Doktor Ilmu Adm.
Gedung : F 101.Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

LEMBAR PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa:

NBI dan Nama : Anggraeni Yohan Sonata-1111800086
Program Studi : Administrasi Negara

Memerintahkan untuk mengadakan Revisi Skripsi sbb:

No	Keterangan Revisi
	Revisi Hasil Penelitian <i>mdak acc.</i>

Surabaya, 28/06/2022 19:36L07

Setuju telah direvisi,
Dosen Penguji,

(Drs. Teguh Santoso, M.Si)

Dosen Penguji,

(Drs. Teguh Santoso, M.Si)

Lampiran 8. Hasil Turnitin

IMPLEMENTASI PERGUB JATIM NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI (UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya)

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	7%
2	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	4%
3	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	2%
4	id.scribd.com Internet Source	2%
5	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
6	journal.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

